

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pengadaan Tanah Kantor Gubernur Bali

Dikjaya¹ Muhamat Hafis²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: dikajaya033@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tindakan pemerintah dalam kasus Ida Ayu Wirasadi dkk. terhadap Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Fokus penelitian mencakup penilaian kepatuhan pemerintah terhadap prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta analisis dasar hukum dan kemungkinan keberhasilan gugatan yang diajukan oleh pihak Ida Ayu Wirasadi dkk. Analisis ini akan mengeksplorasi prosedur pengadaan tanah yang diterapkan, memeriksa apakah hak-hak pihak yang terdampak telah dihormati, dan menilai argumen hukum serta kekuatan gugatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pertanahan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perlindungan hak milik tanah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum dan mekanisme pengadilan dalam kasus ini.

Kata Kunci: Ida Ayu Wirasadi, Penelitian, Pemerintah, Hukum, Tanah

Abstract

This research aims to evaluate whether the government's actions in the case of Ida Ayu Wirasadi et al. against the Bali Provincial Government have fulfilled the provisions of land acquisition for public interest in accordance with Law No. 2/2012. The focus of the research includes an assessment of the government's compliance with the legal procedures stipulated in the law, as well as an analysis of the legal basis and likelihood of success of the lawsuit filed by Ida Ayu Wirasadi et al. The analysis will explore the land acquisition procedures applied, examine whether the rights of affected parties have been respected, and assess the legal arguments and strength of the lawsuit based on the applicable legal provisions. This research is expected to contribute to the development of land law in Indonesia, particularly in improving the protection of land property rights. The approach used is descriptive-analytical, which allows for an in-depth understanding of the application of the law and court mechanisms in this case.

Keywords: Ida Ayu Wirasadi, Research, Government, Law, Land



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Ida Ayu Wirasadi dan kelompoknya menggugat Pemerintah Provinsi Bali terkait sengketa tanah di area strategis dekat kantor gubernur Bali¹. Mereka mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hak milik mereka yang sah dan bahwa proses pengadaan tanah oleh pemerintah tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.² Penggugat menuduh pemerintah tidak mengikuti prosedur hukum, seperti tidak memberikan kompensasi yang sesuai dan tidak melibatkan pihak-pihak terdampak dalam proses pengadaan. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut keadilan, pemulihan hak, dan kompensasi yang layak serta untuk memastikan

¹ (PEMERINTAH PROVINSI BALI)

² (RI, 2012)

kepastian hukum mengenai status tanah. Kasus ini signifikan karena dapat mempengaruhi cara pemerintah melaksanakan proses pengadaan tanah dan memperjelas perlindungan hak milik tanah dalam hukum Indonesia, serta berdampak pada kebijakan dan praktik pengadaan tanah di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali informasi tentang perbuatan melawan hukum atas pengadaan tanah kantor gubernur Bali. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi, studi literatur terkait, dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengeksplorasi pola-pola, tema, dan hubungan antarvariabel yang muncul dari data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pembangunan

Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor gubernur Bali merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan. Dengan memiliki kantor yang modern dan memadai, efisiensi serta efektivitas pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan. Pembangunan kantor gubernur yang strategis akan memudahkan akses bagi masyarakat dan pegawai, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kualitas layanan. Fasilitas yang baik juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, sehingga pegawai dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memang seringkali dilakukan guna mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.³ Proyek-proyek ini meliputi pembangunan fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, taman, dan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan bandara. Pembangunan fasilitas publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, sekolah dan rumah sakit yang dibangun di lokasi strategis akan memudahkan akses warga terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan prasarana yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar mobilitas barang dan jasa. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menarik investasi ke daerah tersebut. Dengan demikian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah langkah krusial dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal. Ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

Penggunaan Tanah yang Efektif

Ida Ayu Wirasadi mungkin mengajukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan tanah yang sebelumnya tidak produktif atau tidak terpakai dengan baik. Dengan melakukan pengadaan ini, tanah yang selama ini terbengkalai dapat diubah menjadi lokasi yang mendukung pembangunan

³ (UUD RI NOMOR 2 TAHUN 2021)

infrastruktur dan fasilitas publik. Optimalisasi tanah yang tidak produktif sangat penting untuk meningkatkan nilai guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, tanah kosong bisa dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau, pusat komunitas, atau fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga mendorong interaksi sosial dan pengembangan masyarakat.⁴

Kerjasama dengan Pihak yang Berhak

Dalam proses pengadaan tanah, penting untuk melakukan konsultasi publik dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berhak, termasuk masyarakat setempat. Langkah ini tidak hanya memastikan bahwa semua suara didengar, tetapi juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Konsultasi publik memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, dan saran terkait rencana pengadaan tanah. Ini dapat membantu pihak berwenang memahami konteks sosial dan budaya setempat, sehingga keputusan yang diambil lebih relevan dan berkelanjutan. Selain itu, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemilik tanah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal, sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengadaan, potensi konflik dapat diminimalkan dan transparansi dalam proses tersebut dapat terjaga.

Penggantian Kerugian

Jika pengadaan tanah ini melibatkan penggantian kerugian bagi pihak yang berhak, seperti masyarakat setempat, Ida Ayu Wirasadi mungkin mengajukan beberapa langkah penting terkait proses penggantian kerugian yang harus dilakukan. Proses ini perlu dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkena dampak mendapatkan kompensasi yang adil dan transparan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penggantian kerugian:

1. Penilaian yang Objektif: Melakukan penilaian yang akurat terhadap nilai tanah dan aset yang terpengaruh, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, kondisi tanah, dan potensi penggunaan di masa depan.
2. Konsultasi dengan Pemilik Tanah: Melibatkan pemilik tanah dan masyarakat dalam diskusi mengenai penggantian kerugian. Ini akan membantu memastikan bahwa mereka merasa didengarkan dan diakui dalam proses tersebut.
3. Transparansi dalam Proses: Memastikan bahwa seluruh proses penggantian kerugian dilakukan dengan transparan, dengan informasi yang jelas tentang bagaimana penilaian dilakukan dan bagaimana kompensasi akan diberikan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penggantian kerugian dalam pengadaan tanah dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat tidak hanya akan meminimalkan potensi konflik, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor gubernur Bali bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendukung kepentingan umum. Pembangunan infrastruktur

⁴ (PEMERINTAH PROVINSI BALI)

modern akan mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Namun, proses ini harus mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Konsultasi publik penting untuk melibatkan masyarakat setempat, dan kompensasi bagi pemilik tanah harus adil dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan tanah tidak hanya memberikan manfaat bagi pembangunan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved September 9, 2024, from Pemerintah Provinsi Bali: <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/putusan-pengadilan/putusan-badan-peradilan/29046>.
- Anonim (14 Maret 2022). Database Kejaksaan Tinggi Bali. Retrieved Oktober 3, 2024. <https://www.kejati-bali.go.id/berita/detail/817>
- Anonim (25 April 2023), Gubernur Wayan Koster Serahkan Hibah Tanah Seluas 7,5 Are di Desa Adat Panjer dan 16,5 Are di Penatih Puri <https://www.baliprov.go.id/web/gubernur-wayan-koster-serahkan-hibah-tanah-seluas-75-are-di-desa-adat-panjer-dan165-are-di-penatih-puri/>
- I Kadek Dwipa Nugraha (2023). 'Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Di Kabupaten Klungkung', Skripsi Pada Program Studi Pertahanan, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Indonesia.
- Indonesia. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 153/Kep. 156-Huk/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Bandung.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- RI, B. (2012, Januari 14). Database Peraturan JDIH BPK. Retrieved September 9, 2024, from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012>.